

Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pengembangan Wilayah Perbatasan

Thursday, 23 September 2021 WIB, Oleh: Satria

NKRI sebagai negara maritim memiliki banyak kekayaan. Hal ini perlu dijaga secara langsung maupun dengan regulasi. Perbatasan Indonesia yang sangat beragam memberikan tuntutan bagi Indonesia untuk pemberdayaan wilayah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kontribusi dari berbagai pihak mulai pihak pemerintah, masyarakat, hingga perguruan tinggi.

Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengharapkan perguruan tinggi dalam memberikan inovasi serta mendorong terhadap masyarakat khususnya di daerah perbatasan.

“Sehingga (daerah) perbatasan juga menjadi titik ekonomi baru bagi bangsa kita,” ujar Mendagri saat memberi sambutan pada Peringatan Sebelas Tahun Pengelolaan Perbatasan Negara pada Jumat (17/9).

Dalam paparannya, Prof. Dr. Suratman, M.Sc., Dosen Fakultas Geografi, yang hadir mewakili Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan (FOPERTAS) UGM menuturkan posisi NKRI merupakan posisi yang strategis di Kawasan Asia Tenggara dan memiliki potensi sebagai poros maritim dunia.

“NKRI negara maritim memiliki kekayaan luar biasa mulai dari minyak dan ragam potensi kepulauannya. Konsep archipolis inilah yang mestinya kita garap bersama sebagai pulau yang memiliki sabuk penghubung, sabuk pengaman, sabuk ekonomi, dan sabuk konservasi,” imbuh Suratman

Ia menuturkan bahwa perguruan tinggi dalam berkontribusi pada wilayah perbatasan menggunakan pendekatan *soft power*. Dalam pengelolaan kawasan batas negara diperlukan 3 pilar sebagai pertimbangan yaitu keberlanjutan, pertahanan dan keamanan, serta pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Saat ini FOPERTAS memiliki 10 program inovatif tridarma,” jelasnya.

Program ini mencakup Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian KKN, sekolah perbatasan, dan Profesor go to border.

“Di Provinsi Kalimantan Barat kami melakukan pendekatan ekonomi dan demikian halnya dengan Papua,” tutur Suratman.

Saat ini terdapat 6 Pusat Kawasan Strategis Negara (PKSN) yang menjadi Proyek Utama Kawasan Perbatasan yaitu PKSN Paloh Aruk dan Nunukan di Pulau Kalimantan, PSKN Kefamenanu dan Atambua di Nusa Tenggara, serta PKSN Jayapura dan Merauke di Pulau Papua.

FOPERTAS memiliki strategi yaitu menyusun peta jalan program pembangunan inovasi berbasis IPTEK berkelanjutan, potensi peluang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal hingga global, dan menjadikan PKSN sebagai model pengembangan pembelajaran lapangan studi kasus.

Semua upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah

perbatasan.

Selengkapnya [disini](#).

Penulis: Khansa

Berita Terkait

- [UGM dan 9 Perguruan Tinggi Inisiasi Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara](#)
- [Perguruan Tinggi Prihatinkan Maraknya Konflik di Kawasan Perbatasan](#)
- [Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat Hadapi Banyak Tantangan](#)
- [27 Daerah Perbatasan Masih Tertinggal](#)
- [Pemerintah Serius Benahi Konflik di Daerah Perbatasan](#)